

PERENCANAAN PARTISIPATIF PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA TANGERANG

Ronald Titon
(Pemerintah Daerah Kota Tangerang)

R. Luki Karunia
(STIA Lembaga Administrasi Negara, Jakarta)
karunialuki@yahoo.com

Abstract

This study aims to analyze the participatory planning process at the Tangerang City Public Works Agency. The method used in this study is descriptive with a qualitative approach. The focus of participatory planning analysis research based on participatory planning models includes aspects: Investigation, Problem Formulation, Identification of Carrying Capacity, Formulation of Objectives, Establishing Detailed Steps, and Designing a Budget. The sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques with observation, interviews, and documentation. Data analysis method with data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of the analysis show that the aspect of investigation starts from the level of RT / RW, Village Musrenbang, District Musrenbang up to the SKPD Forum. Aspect formulation of the problem found data collected is what is truly felt by the community, even though there are some of the data collected which is then used as an activity not felt in the expected year. The identification aspect appears to be carrying capacity. Aspects of formulating objectives have used the principles: Transparent, Responsive, Participatory, and Accountable. The aspect of setting detailed steps, the planning process carried out already contains what will be achieved, what activities will be carried out in accordance with the planning document and the proposed results of the Musrenbang, the division of tasks / responsibilities at the government level, especially the technical service the community level only proposes proposals for activities, and has included time even though it is still general. Community involvement should be carried out continuously. Government officials are expected to be resource persons and facilitators and mediators in the planning process. An information system is needed that specifically handles the planning process that can be accessed by the general public in order to see the proposals and the results of the planning process that has been implemented.

Keywords: Partisipative Planning Process

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perencanaan partisipatif pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian analisis perencanaan partisipatif berdasarkan model perencanaan partisipatif meliputi aspek: Penyelidikan, Perumusan Masalah, Identifikasi Daya Dukung, Perumusan Tujuan, Menetapkan Langkah-Langkah Rinci, dan Merancang Anggaran. Sumber yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada aspek penyelidikan dimulai dari tingkat RT/RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai dengan Forum SKPD. Aspek perumusan masalah ditemukan data yang dihimpun adalah yang benar dirasakan oleh masyarakat, meskipun ada beberapa dari data yang dihimpun yang kemudian dijadikan kegiatan tidak dirasakan pada tahun yang diharapkan. Aspek identifikasi tampak adanya daya dukung. Aspek perumusan tujuan sudah menggunakan prinsip-prinsip: Transparan, Responsif, Partisipatif, dan Akuntabel. Aspek menetapkan langkah-langkah rinci, proses perencanaan yang dilakukan sudah memuat apa-apa yang akan dicapai, kegiatan-kegiatan apa saja yang hendak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan usulan hasil musrenbang, pembagian tugas/tanggung jawab pada tingkatan pemerintahan khususnya dinas teknis sedangkan pada tingkatan masyarakat hanya mengusulkan usulan kegiatan, dan sudah memuat waktu walaupun masih bersifat umum.

Keterlibatan masyarakat agar dilaksanakan secara kontinyu. Aparatur pemerintah diharapkan dapat menjadi narasumber dan fasilitator serta mediator dalam proses perencanaan. Diperlukan sebuah sistem informasi yang khusus menangani proses perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum agar dapat melihat usulan-usulan maupun hasil-hasil proses perencanaan yang telah dilaksanakan.

Keywords: Proses perencanaan partisipatif

1. PENDAHULUAN

Musrenbang merupakan wahana publik (*public event*) yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “*top Down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (*community need assessment*) dengan penilaian yang bersifat teknis (*technical assessment*), resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non *government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan. Secara umum tujuan dari musrenbang harus berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 050-187/kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang dilaksanakan baik pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, SKPD maupun tingkat Kota. Walaupun selama ini hasil dari forum tersebut di beberapa daerah tidak bisa dimplementasikan dan formalitas saja. Pendekatan partisipatif melalui musrenbang hanya retorika saja, perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim.

Proses Musrenbang SKPD (Forum SKPD) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang hanya berisi kegiatan berupa paparan dari Dinas Pekerjaan Umum mengenai kegiatan

yang dilaksanakan tahun yang akan datang. Peserta hanya diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai seputar kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada diskusi dan negoisasi antara Pemerintah Daerah dengan Peserta tentang isu-isu atau permasalahan serta pemecahan masalah. Seperti dikemukakan sebelumnya bahwa Keterlibatan *stakeholders* dalam memberikan aspirasi dan kebutuhan merupakan faktor sangat menentukan dalam menentukan keluaran hasil musrenbang. Bertitik tolak dari permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu mendeskripsikan proses perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang.

Menurut Abe (2005:77), langkah-langkah perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom-up*) dan bukan dari perencanaan atas inisiatif dari pemerintah daerah dapat digambarkan sebagai berikut: (a) Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. (b) Perumusan masalah adalah proses analisis bermakna sebagai tindakan untuk menemukan kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain. (c) Identifikasi daya dukung adalah keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. (d) Perumusan tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan). (e) Menetapkan langkah-langkah secara rinci adalah proses menyusun apa saja yang akan dilakukan. (f) Merancang anggaran sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah

Observasi, wawancara, dokumen pribadi dan resmi, foto, rekaman, gambar, dan percakapan informal, buku-buku dan situs dan sebagainya semua merupakan sumber-sumber data kualitatif. Sumber yang paling umum digunakan adalah wawancara (*key Informan*), observasi dan dokumen, kadang-kadang dipergunakan secara bersama-sama dan kadang-kadang secara individual. Untuk *key Informan* dilakukan kepada (1) Kabid Bina Marga Dinas PU (2) Kasubag Perencanaan Bappeda (3) Kasubag Perencanaan Dinas PU.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelidikan

Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Penyelidikan disini bukan sebagai kegiatan akademis, melainkan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya perubahan.

Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi. Penyelidikan yang dilakukan di masyarakat biasanya pada kebutuhan-kebutuhan yang masyarakat butuhkan terutama hal-hal yang bersifat fisik, seperti pembangunan jalan lingkungan, pembangunan drainase, rehabilitasi drainase, pemeliharaan jalan lingkungan, dll.

Berkaitan dengan penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang mengatakan bahwa “semua usulan paket kegiatan itu berasal dari masyarakat yang kemudian dilakukan survey ke lapangan untuk melihat seberapa besar tingkat kebutuhannya/apakah menjadi prioritas atau tidak yang diusulkan oleh masyarakat”. Selain itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang mengatakan bahwa “pemerintah daerah selalu melakukan kegiatan perencanaan pembangunan baik itu bersifat jangka panjang, menengah, ataupun tahunan. Yang bersifat tahunan biasanya

dimulai melalui penggalian dari aspirasi, terutama melalui Rembug Warga terus dilanjutkan dengan Musrenbang Kelurahan, kecamatan sampai dengan musrenbang RKPD. Jadi dari situ disimpulkan bahwa yang namanya proses perencanaan itu dimulai dari yang pertama adalah berdasarkan kebutuhan lokal dari masyarakat (baik itu ya fisik ataupun non fisik). Proses tersebut setiap tahun dilakukan dengan melibatkan masyarakat sehingga dapat diketahui apa-apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat”. Sedangkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang mengatakan bahwa “setelah usulan disetujui dari warga dilakukan survey ke lapangan oleh tim survey dari dinas untuk mengecek kebenarannya”.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyediaan ini menjadi faktor kunci karena masyarakat diajak untuk mengumpulkan, menggali dan mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi. Dalam proses perencanaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, masyarakat diikutkan dari awal mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan Musrenbang SKPD. Hal ini sesuai dengan pendapat Alexander Abe (2005:78) menjelaskan bahwa “keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi”.

Bahwa berdasarkan analisis data, observasi, dan dengan membandingkan teori yang digunakan, pada tahap penyelidikan dalam proses perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang dapat diketahui keterlibatan masyarakat dalam mengetahui, menggali, mengumpulkan informasi, dan mengenali secara seksama masalah-masalah yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang sudah dimulai di Tingkat RT/RW sampai saat dengan pelaksanaan Musrenbang SKPD (Forum SKPD).

Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang

telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Untuk mencapai perumusan, pada dasarnya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data dan pengalaman hidup masyarakat. Proses analisis sendiri bermakna sebagai tindakan untuk menemukan kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Apa yang dirumuskan harus sederhana, jelas dan kongkrit.

Agar rumusan masalah dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas (masyarakat), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan data yang dihimpun benar-benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan dari masyarakat. Dalam hal ini, tidak semua apa yang disampaikan masyarakat harus diterima, justru pada saat itulah momentum untuk bersama-sama masyarakat memilah-milah mana segi-segi yang merupakan kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan. Suatu keinginan tentu saja memiliki kadar subjektivitas yang tinggi, dan cenderung tanpa batas yang jelas. Oleh sebab itu yang hendak menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat.

Seperti dijelaskan pada tahap penyelidikan sebelumnya bahwa masyarakat dilibatkan dalam mengetahui, menggali, dan mengumpulkan informasi serta mengenali secara seksama masalah-masalah yang ada disekitarnya. Hubungan dengan perumusan masalah bahwa hasil positif dari keterlibatan masyarakat dalam proses penyelidikan tersebut adalah masalah yang diusulkan dalam Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD memang benar-benar apa yang dirasakan masyarakat, oleh karena itu akan menjadikan lebih mudah dalam tahap perumusan masalah.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang mengatakan bahwa “masyarakat yang mengetahui persis seberapa besar kebutuhan mereka, seberapa besar permasalahan yang mereka hadapi di lapangan khususnya masalah infrastruktur (lokasinya dimana dan seberapa banyak

orang yang menggunakannya sehingga menjadi prioritas)”. Sedangkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang mengatakan bahwa “dalam pengolahan data melibatkan masyarakat dalam hal data primer, sedangkan data olahan atau data sekunder itu nanti diolah oleh tim SKPD”. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh para informan, maka dapat disimpulkan

- a. Proses perencanaan dengan mengolah data sehingga diperoleh gambaran yang lengkap, utuh mendalam, masyarakat turut dilibatkan dalam proses tersebut.
- b. Data-data yang dihimpun itu benar-benar sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun ada beberapa dari data-data yang dihimpun yang kemudian dijadikan kegiatan tidak dirasakan pada tahun yang diharapkan.
- c. Data-data yang dihimpun sudah berdasarkan pemilihan prioritas baik di tingkat Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD.

Identifikasi Daya Dukung

Dalam masalah ini daya didukung tidak diartikan sebagai dana kongkrit (uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Daya dukung yang dimaksudkan pada permasalahan ini bisa bermakna ganda: (1) daya dukung kongkrit, aktual, ada tersedia dan (2) daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan). Pemahaman mengenai daya dukung ini diperlukan agar rencana kerja yang disusun tidak bersifat asal-asalan, tetapi benar-benar merupakan hasil perhitungan yang masak. Proses identifikasi daya dukung dalam proses perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum dengan adanya Musrenbang Kelurahan ataupun Musrenbang Kecamatan yang dihadiri oleh masyarakat dan adanya kesepakatan prioritas kegiatan sudah merupakan daya dukung dari masyarakat.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa “kalau masyarakat di sekitar situ, pasti mendukung

dan terkadang yang menjadi faktor penyebab permasalahan di lapangan ini adalah LSM". Sedangkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengatakan bahwa "daya dukung yang jelas kita sesuaikan terutama daya dukung keuangan/anggaran. Selain itu misalnya sumber daya dukung yang lain (ketersediaan tanah), ini bisa jadi hambatan biasanya, karena tanah yang diusulkan untuk dibangun suatu gedung ataupun apa itu ternyata kita belum miliki, masih tanah orang. Dan jika sumber SDM masyarakat sekiranya sudah cukup mendukung". Adapun Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa proses perencanaan ini sudah mengidentifikasi daya dukung konkret aktual yang tersedia.

Kemudian berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan, tahap identifikasi dukungan dalam proses perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang dapat diketahui:

- a. Dukungan yang kongkrit dan nyata adalah dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses Musrenbang Kelurahan/Musrenbang Kecamatan/Forum SKPD yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan.
- b. Dukungan yang kongkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya lain tidak ada karena hasil dari Forum SKPD sifatnya usulan saja.
- c. Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan) juga tidak ada karena dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa dukungan kongkrit dan nyata sudah ada dahulu.

Perumusan Tujuan

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa "pengambilan keputusan dapat diketahui masyarakat. Masyarakat juga diundang/dilibatkan mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang

Kecamatan, Forum SKPD hingga Musrenbang Kota/RKPD". Sedangkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengatakan bahwa "kedepan akan dilakukan yang namanya musrenbang *on-line* berbasis internet sehingga masyarakat ataupun orang luar bisa melihat tujuan dari pembangunan, prioritas pembangunan, karena nanti sistemnya akan dipublikasikan". Selain itu Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa "kegiatan yang dilakukan untuk merespon dan menjabarkan janji-janji Walikota".

Berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan, pada tahap perumusan tujuan dalam proses perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang dapat diketahui bahwa dalam perumusan tujuan sudah menggunakan prinsip-prinsip:

- a. Transparan, ini dilihat dari tahapan-tahapan musrenbang (Rembug Warga, kelurahan, kecamatan, dan Forum SKPD) dalam proses pengambilan keputusan masyarakat selalu dilibatkan baik secara langsung (ketika masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah dan mengusulkan kegiatan sejak mulai Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, maupun Forum SKPD) maupun tidak langsung (ketika dipilihnya perwakilan masyarakat untuk mengikuti Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD serta untuk menentukan usulan daftar skala prioritas kegiatan. Perwakilan masyarakat ini dipilih secara terbuka dalam forum). Proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak tingkat Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai dengan Forum SKPD sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat.
- b. Responsif, ini dilihat dari keterlibatan masyarakat sejak awal dari Rembug Warga sampai dengan Forum SKPD sehingga program-program yang

muncul merupakan hasil dari isu-isu yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk segera mengatasinya. usulan kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat dan perwujudan janji kepala daerah sewaktu kampanye

- c. Partisipatif, dengan keterlibatan perwakilan masyarakat selama proses berlangsung dari awal hingga akhir Forum SKPD akan lebih serius dalam memperhatikan dan mengangkat isu-isu yang berkembang pada wilayah perwakilan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat menjadi suatu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat
- d. Akuntabel, dengan dilaksanakannya seluruh proses Forum SKPD dilakukan secara transparan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan lebih dilegitimasi oleh masyarakat. Seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat serta hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Menetapkan Langkah-Langkah Secara Rinci

Penetapan langkah-langkah adalah proses menyusun apa saja yang akan dilakukan. Sebetulnya proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan dalam sebuah rencana tindak. Umumnya suatu rencana tindakan akan memuat: (1) apa yang akan dicapai, (2) kegiatan yang hendak dilakukan, (3) pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab (siapa bertanggung jawab atas apa), dan (4) waktu (kapan dan berapa lama kegiatan akan dilakukan). Untuk menyusun langkah yang lebih baik, maka diperlukan kejelasan rumusan dengan menggunakan pernyataan tegas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa “pada proses perencanaan sudah memuat apa-apa yang

ingin dicapai nanti. Adapun Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang mengatakan bahwa dalam proses perencanaan pasti ada hal-hal yang ingin dicapai nanti”. Sedangkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang mengatakan bahwa “dalam proses perencanaan memuat apa yang akan dicapai. Semuanya yang akan dicapai tertuang dalam dokumen perencanaan dalam bentuk target-target pembangunan”.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh para informan, maka dapat disimpulkan dalam menetapkan langkah-langkah secara rinci, proses perencanaan sudah memuat waktu walaupun masih bersifat umum.

Kemudian berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan, tahap menetapkan langkah-langkah rinci dalam proses perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang dapat diketahui:

- a. Proses perencanaan yang dilakukan sudah memuat apa-apa yang akan dicapai.
- b. Proses perencanaan yang dilakukan sudah memuat kegiatan-kegiatan apa saja yang hendak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan usulan hasil musrenbang.
- c. Proses perencanaan sudah memuat pembagian tugas/tanggung jawab pada tingkatan pemerintahan khususnya dinas teknis sedangkan pada tingkatan masyarakat hanya mengusulkan usulan kegiatan.
- d. Proses perencanaan sudah memuat waktu walaupun masih bersifat umum.

Merancang Anggaran

Perencanaan anggaran disini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. Penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan. Anggaran juga bisa bermakna sebagai sarana kontrol.

Berkaitan dengan merancang anggaran dalam proses perencanaan partisipatif di

Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa “proses merancang anggaran dengan menyusun alokasi anggaran atau sumberdaya yang tersedia”. Sedangkan Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengatakan bahwa “merancang anggaran dalam proses perencanaan itu sudah disiapkan. Misalnya untuk didalam dokumen renstra itu ada tiap tahunnya berapa kegiatan yang selanjutnya nanti dituangkan didalam renja sudah ada anggarannya”. Selain itu, Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa “dalam menyusun perencanaan itu berdasarkan anggaran yang tersedia. Contohnya Dinas PU membutuhkan 700 milyar rupiah ternyata pagu anggaran disetujui oleh bappeda hanya 500 milyar rupiah. Jadi Dinas PU mensinkronisasikan usulan yang diterima dari masyarakat berdasarkan anggaran yang diterima. Adapun Kepala Sub Bagian Perencanaan Kecamatan Larangan mengatakan bahwa memang anggaran itu harus sudah dialokasikan dengan sumber daya yang ada”. Bahwa berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan teori yang digunakan, pada tahap merancang anggaran dalam proses perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang dapat diketahui keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak ada karena pada tahapan ini menjadi domainnya pemerintah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Aspek Penyelidikan perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam mengetahui, menggali, mengumpulkan informasi, dan mengenali secara seksama masalah-masalah yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif di Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang sudah dimulai di Tingkat RT/RW sampai saat dengan pelaksanaan Musrenbang SKPD (Forum SKPD). Aspek Perumusan Masalah ditemukan proses perencanaan dengan mengolah data sehingga diperoleh gambaran yang lengkap, utuh mendalam, masyarakat turut dilibatkan dalam proses tersebut. Data-data yang

dihimpun itu benar-benar sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun ada beberapa dari data-data yang dihimpun yang kemudian dijadikan kegiatan tidak dirasakan pada tahun yang diharapkan. Serta data-data yang dihimpun sudah berdasarkan pemilihan prioritas baik di tingkat Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD.

Aspek Identifikasi Daya Dukung *tampak* dukungan yang kongkrit dan nyata adalah dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses Musrenbang Kelurahan/Musrenbang Kecamatan/Forum SKPD yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan. Dukungan yang kongkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya lain tidak ada karena hasil dari Forum SKPD sifatnya usulan saja. Daya dukung yang merupakan potensi (akan ada atau bisa diusahakan) juga tidak ada karena dukungan ini muncul kalau ada dukungan yang berupa dukungan kongkrit dan nyata sudah ada dahulu. Perumusan tujuan sudah menggunakan prinsip-prinsip: Transparan, proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak tingkat Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan sampai dengan Forum SKPD sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat. Responsif, usulan kegiatan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat dan perwujudan janji kepala daerah sewaktu kampanye. Partisipatif, keterlibatan masyarakat menjadi suatu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat. Akuntabel, seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat serta hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan. Untuk aspek menetapkan langkah secara rinci Proses perencanaan yang dilakukan sudah memuat apa-apa yang akan dicapai. Proses perencanaan yang dilakukan sudah memuat kegiatan-kegiatan apa saja yang hendak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan usulan hasil musrenbang. Proses perencanaan sudah memuat pembagian tugas/tanggung jawab pada

tingkatan pemerintahan khususnya dinas teknis sedangkan pada tingkatan masyarakat hanya mengusulkan usulan kegiatan.

Proses perencanaan sudah memuat waktu walaupun masih bersifat umum. Merancang Anggaran Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak ada karena pada tahapan ini menjadi domainnya pemerintah.

Saran

Dari kesimpulan penelitian, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: Keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD hingga musrenbang tingkat kota agar dilaksanakan secara kontinyu agar masyarakat dapat mengetahui, menggali, mengumpulkan informasi dan mengenali secara seksama masalah-masalah yang ada. Aparatur pemerintah diharapkan dapat menjadi narasumber dan fasilitator serta mediator dalam proses perencanaan. Diperlukan sebuah sistem informasi yang khusus menangani proses perencanaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum agar dapat melihat usulan-usulan maupun hasil-hasil proses perencanaan yang telah dilaksanakan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Abdullah, Assegaf Ibrahim. 1995. *Dictionary of Accounting*. Jakarta. Mario Grafika.
- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta. Pembaruan.
- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making Second Edition*. New York. Holt, Rinehar and Winston.
- Badudu, Zain Muhammad Sutan. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Cornwall, Andrea. 2000. *Beneficiary, Consumer, Citizen, Perspective on Participation of Poverty Reduction*. www.acdi-cida.ge.ca
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- GTZ. 2000. *Local Development Planning*. Jakarta. GTZ Office.
- Holdar, Gina Gilbreath et.all. 2002. *Citizen Participation Handbook, People's voice Project International centre for Policy Studies*. Ukraine. The World Bank, CIDA, CBIE-BCEI.
- Howlett, Michael, Ramesh, M. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Canada. Oxford University Press.
- Innes, Judith E, Booher, David E. (2000). *Public Participation in Planning New Strategies for the 21st Century*. University of California at Berkeley.
- Islamy, M. Irfan. 2003. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kamelus, Deno et.all. 2004. *Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di Daerah*. Jakarta. GTZ.
- Keban, Yermis T. 2001. *Pokok-pokok Pikiran Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten/Kota, Workshop Pejabat Legislatif dan Eksekutif Daerah Kab/Kota*. Yogyakarta. MAP UGM.
- Lester, James P, Stewart, Joseph. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach*. USA. Wadsworth, Stamford.
- Mayer, Robert R. 1985. *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*. New Jersey. Prentice-Hall Inc.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002. Mataram. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, PT. Grasindo.
- Robert, Nancy. 2004. *Public Deliberation In An Age Of Direct Citizen Participation*. USA. Sage Publications.

- Soenarko. 2000. *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Suhirman. 2003. *Partisipasi Dalam Proses Pembuatan Kebijakan: Analisi atas Kerangka Hukum dan Praktek Pembuatan Kebijakan Ketenagakerjaan*. Jakarta. PEG-USAID.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Cetakan ke-1 tahun 2004. Yogyakarta. Gava Media.
- Tjiptono, Fandy. 2000. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*, cetakan ke-18 tahun 1985. Jakarta. Toko Gunung Agung.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Cetakan ke-4 tahun 2002. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Todaro, Michael P. 1986. *Development Planning*. Oxford University Press.
- Wibawa, Samodra, 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta, Intermedia.
- Yamit, Julian. 2001. *Managemen Kualitas Produk dan Jasa*. Yogyakarta. Ekonosia.